

**IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN
DI KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA**

Pirdani, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, email: dhony_kampoesbiroe08@yahoo.com

ABSTRAK

Kata kunci: Program Simpan Pinjam Perempuan, Komunikasi antar Pelaksana, Sikap Pelaksana, Kondisi Sosial dan Ekonomi

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui kinerja implementasi program simpan pinjam perempuan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif yang memfokuskan pada variabel komunikasi antar pelaksana, sikap pelaksana, kondisi sosial dan ekonomi. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi program simpan pinjam perempuan masih belum maksimal, masih terdapat kelompok simpan pinjam perempuan yang melakukan penunggakan dana pinjaman, hal ini dipengaruhi oleh kurangnya koordinasi antara unit pengelola kegiatan dan fasilitator kecamatan selaku pelaksana program simpan pinjam perempuan, unit pengelola kegiatan tidak serius dalam menangani kelompok simpan pinjam perempuan yang bermasalah, serta keadaan sosial ekonomi kelompok simpan pinjam perempuan yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah sehingga usaha yang digeluti tidak dapat berkembang dengan baik karena mereka hanya memfokuskan pada pemenuhan ekonomi rumah tangga.

ABSTRACT

Keywords: Save and Borrow Women Program, Communication Between Organizer, Organizer Attitude, Social and Economy Condition

This article written as purpose to know how effect implementation save and borrow women program national program decent stand alone society rural at east serasan subdistrict natuna regency. This research include on descriptive research with qualitative analysis that focus on communication variable interorganization or organizer activity, organizer attitude and social economy condition. Result of field research show that program implementation save and borrow women program not maximal yet, there are still save and borrow women group that have arrears and misuse lend fund. That happen because the less coordination between organizer activity unit and subdistrict facilitator as Save and borrow women program organizer. organizer activity unit unseriously to handle save and borrow women group that have problem, and social economy condition save and borrow women group that from economy middle class until that effort can't good grow because they just focus to fulfillment economy of household.

A. PENDAHULUAN

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan. Sejak diimplementasikan di Kecamatan Serasan Timur, PNPM Mandiri Perdesaan telah melaksanakan beberapa program baik di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan pembangunan fisik. Salah satu program PNPM Mandiri Perdesaan di bidang ekonomi adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yaitu suatu program pinjaman dana kepada kelompok masyarakat yang dianggap miskin dan dana tersebut dimanfaatkan untuk tambahan modal usaha.

Secara umum tujuan dari kegiatan SPP ini adalah untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan. Sementara itu, tujuan khusus dari kegiatan SPP ini adalah mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar, memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha, dan mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

Sasaran dari kegiatan SPP ini adalah masyarakat miskin produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang sudah ada di masyarakat. Setiap kelompok terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota. Setiap kelompok SPP wajib menyertakan proposal pinjaman yang disetujui oleh kepala desa, proposal tersebut berisikan rencana usaha anggota (RUA) dan rencana gabungan bersama (Gabungan RUA) yang akan menjadi dasar pertimbangan UPK untuk menerima permohonan pinjaman tersebut. Pelaksanaan program SPP melibatkan beberapa pihak diantaranya Unit pengelola kegiatan (UPK), Fasilitator Kecamatan (FK), dan kelompok SPP (*target group*).

Tujuan dari program SPP akan tercapai jika ketiga unsur pelaksana tersebut saling berkerjasama dalam melaksanakan program. Akan tetapi dalam pelaksanaan program SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Serasan Timur, tampak

kurangnya koordinasi yang terjalin antara pihak UPK dan FK terhadap kelompok SPP, seperti kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program SPP serta pemanfaatan dana SPP, hal ini menyebabkan rentan terjadinya penyalahgunaan dana SPP untuk keperluan lain sehingga berdampak pada penunggakan pembayaran cicilan pinjaman

Sikap implementor merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program SPP, keseriusan implementor dalam menjalankan program menjadi penentu keberhasilan program yang dijalankan, dalam pelaksanaan program SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Serasan Timur, kelompok SPP selaku pelaksana utama kurang serius dalam menjalankan program SPP, bahkan ada unsur kesengajaan dari anggota kelompok untuk tidak membayar tepat waktu sehingga terjadinya penunggakan, pihak UPK juga dinilai tidak serius dalam mengatasi permasalahan yang ada, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya sanksi terhadap kelompok yang bermasalah.

Lingkungan sosial ekonomi juga mempengaruhi kurang optimalnya implementasi program SPP, sebagian besar masyarakat yang tergabung dalam program SPP berasal dari keluarga ekonomi menengah kebawah sehingga mereka hanya terfokus pada pemenuhan kebutuhan ekonomi saja, selain itu latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga timbulnya *persepsi* masyarakat yang masih menganggap bahwa instansi pemerintah hanya sebagai “pemberi bantuan” belum dianggap sebagai pendorong (*enabler*), sehingga menganggap bahwa *stimulan* yang diberikan itu merupakan bantuan masyarakat, jadi tidak perlu dikembangkan lebih lanjut.

Dari berbagai permasalahan yang telah ditemukan dalam implementasi program SPP maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan memfokuskan pada kinerja implementasi program SPP. Adapun rumusan permasalahannya adalah Bagaimana Kinerja Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Santi Berjaya di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna, dengan dasar pertimbangan terdapat beberapa kelompok SPP yang terlambat mengembalikan pinjaman sehingga terjadi penunggakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan UPK Santi Berjaya di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. Manfaat penelitian yaitu; secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi

ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik khususnya dalam implementasi kebijakan publik. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pelaksana kebijakan publik, khususnya kepada implementasi program SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Serasan Timur maupun daerah lainnya

B. KAJIAN LITERATUR

Kebijakan merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya (Nugroho R, 2003:1-7). Sedangkan menurut Easton (dalam Islamy, 1992:19), bahwa kebijakan publik hanya pemerintah yang secara syah berbuat sesuatu pada masyarakat dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut dirupakan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai pada masyarakat.

Suatu kebijakan diformulasikan atau dirumuskan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan diperlukan adanya kegiatan implementasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Implementasi menurut Wijaya & Supardo sebagaimana dikutip oleh Pasolong (2008: 57) adalah “proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek”. Karena Sedangkan Gordon (dalam Pasolong, 2008:58) mengatakan bahwa implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Proses implementasi merupakan sebuah abstraksi atau peformansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi dan berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Ada enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2008:142-143) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, diantaranya adalah :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan, Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumber daya, Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Selain itu terdapat sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga yaitu sumber daya finansial dan sumber daya waktu.

3. Karakteristiik agen pelaksana, Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.

4. Sikap/ kecenderungan (*disposition*) para pelaksana, Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik.

5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan suatu kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli sebelumnya, implementasi suatu program bukanlah kegiatan yang sederhana, karena melibatkan banyak faktor yang mempengaruhinya antara lain: komunikasi, sumber daya manusia, pendidikan, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, koordinasi, pengawasan, struktur birokrasi, partisipasi, sikap masyarakat dan lain-lain. Dengan memperhatikan kondisi-kondisi yang mempengaruhi kinerja implementasi program SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Serasan Timur, maka peneliti hanya menggunakan tiga variabel dari model implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Merujuk pada model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, maka variabel yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis program simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Serasan Timur adalah:

1. Komunikasi Pelaksana
2. Sikap/kecenderungan (*disposisi*) para pelaksana.
3. Lingkungan Sosial dan ekonomi

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”.

Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi pada implementasi program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna. Dengan menggunakan metode ini peneliti berharap dapat mengetahui dan memahami serta mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai pelaksanaan dari permasalahan yang diteliti.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan. Penelitian ini memiliki subjek penelitian sebagai landasan untuk mendapatkan informasi-informasi saat meneliti, yaitu sebagai berikut: a) Fasilitator kecamatan (FK), b) Unit Pengelola Kegiatan (UPK), c) Kelompok simpan pinjam perempuan (SPP).

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: a). Wawancara, yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dan mendalam (*depth interview*) kepada orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian dan orang-orang ini telah ditentukan sebelumnya. b). Dokumentasi, yaitu cara pengumpulan data melalui tindakan mencatat dokumen atau data tertulis berupa arsip yang dimiliki UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Serasan Timur berkaitan dengan masalah yang diteliti. c). Observasi, yaitu merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan langsung dan lapangan dimana akan dilakukan penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan (dalam Sugiyono, 2007:88) menyatakan bahwa "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain".

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa "Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.

2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

D. KINERJA IMPELEMNTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN SERASAN TIMUR KABUPATEN NATUNA

Berdasarkan penelitian lapangan yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa pelaksanaan program simpan pinjam perempuan (SPP) di Kecamatan Serasan Timur Kabupaten Natuna belum mendapatkan hasil yang memuaskan, hal ini dapat dilihat dari masih adanya kelompok SPP yang tidak membayar tepat waktu sehingga menunggak lebih dari dua bulan. Berdasarkan analisis lapangan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Komunikasi antar pelaksana

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program SPP di kecamatan serasan timur, yaitu penunggakan pembayaran cicilan yang tidak tepat waktu. Berdasarkan penelitian lapangan, permasalahan tersebut dipengaruhi oleh kurangnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat seperti fasilitator kecamatan (FK), unit pengelola kegiatan (UPK) dan kelompok simpan pinjam perempuan (SPP). Komunikasi dapat berupa sosialisasi dan koordinasi antar pelaksana kegiatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator kecamatan (FK) bahwa kegiatan SPP sebelum diimplementasi telah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak yang telah ditunjuk untuk mengelola program. Berikut kutipan wawancara penulis dengan AS (38) selaku Fasilitator Kecamatan yang menjelaskan bahwa "Sebelum program SPP ini diimplementasikan, kami telah menunjuk UPK selaku unit pengelola untuk melakukan sosialisai kepada masyarakat. Diharapkan dengan sosialisai tersebut memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan SPP".

Hal ini dibenarkan oleh ketua UPK, MZ (27) yang menyatakan bahwa "Sosialisai program SPP telah dilaksanakan seperti mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat, akan tetapi kurang antusiasnya masyarakat yang hadir serta minimnya gagasan yang disampaikan pada saat pertemuan. Untuk itu kita juga menggunakan cara lain yaitu menempel informasi di papan pengumuman dan di warung-warung".

Selanjutnya penulis mewawancarai ketua kelompok yang berinisial DR (28) yang menyatakan bahwa “Sebelumnya kami telah mendapat penjelasan dari pihak UPK mengenai program SPP yang akan dilaksanakan dengan menghadiri pertemuan yang diadakan dibalai desa, akan tetapi terasa sulit dimengerti terkait prosedur yang harus dilakukan baik sebelum melakukan pinjaman, hingga tahap pengembalian”

Selain dari sosialisai, bentuk dari komunikasi adalah koodinasi antar pelaksana yang terlibat dalam program SPP. Berdasarkan wawancara dengan ketua UPK yang menjelaskan bahwa “Dalam pengelolalaannya kami hanya melakukan koordinasi dengan fasilitator Kecamatan dan kelompok SPP itu sendiri, itu pun hanya sebatas koordinasi dengan ketua kelompok saja, selanjutnya informasi diteruskan oleh ketua kepada anggota masing-masing”.

Dari beberapa wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa UPK telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum program SPP diimplementasikan, akan tetapi UPK dinilai belum melakukan tugasnya dengan baik karena UPK selaku pengelola program SPP seharusnya melakukan koordinasi langsung kepada para anggota yang tergabung dalam program SPP, hanya melakukan koordinasi dengan ketua kelompok saja. Dampak dari kurangnya pengawasan yang dilakukan pihak UPK meyebabkan pemanfaatan dana SPP rentan disalahgunakan sehingga berdampak pada penunggakan pembayaran cicilan.

2. Sikap (disposisi) pelaksana

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program SPP yaitu penunggakan pembayaran cicilan tidak terlepas dari pengaruh sikap pelaksana itu sendiri. Prilaku dan sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama. Komitmen yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan menentukan keberhasilan suatu program kebijakan, Hal ini dapat dilihat bagaiman peran UPK dalam mengelola program SPP dan strategi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul berkaitan dengan implementasi program SPP. Selain itu, sikap positif dan negatif dari masyarakat selaku pelaku utama sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program SPP yang dilaksanakan, keseriusan pihak UPK selaku implementor dan kelompok SPP selaku *target group* juga menjadi ujung tombak keberhasilan program SPP yang diimplementasikan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu ketua kelompok SPP, YY (29) yang menjelaskan bahwa “Sebagian besar anggota kelompok saya menggunakan dana tersebut untuk tambahan modal usaha, akan tetapi ada sebagian menggunakan untuk keperluan konsumsi, sehingga pada waktu pembayaran cicilan mereka terlambat membayar kepada saya, akibatnya saya pun terlambat menyetor kepada UPK”. Hal ini dibenarkan oleh UPK yang menjelaskan bahwa Permasalahan utama dalam program SPP adalah pembayaran cicilan yang tidak tepat waktu, selain itu ada indikasi bahwa pemanfaatan dana yang tidak tepat seperti untuk keperluan konsumsi”.

Menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan uang bukan hal yang mudah, apalagi jika berhadapan dengan anggota kelompok SPP yang dominan berasal dari ekonomi menengah ke bawah, untuk itu UPK dan FK menanggung tugas yang berat untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan fasilitator kecamatan (FK) mengenai langkah yang diambil mengatasi hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa “Menanggapi permasalahan tersebut, kami telah melakukan pendekatan dengan kelompok yang bermasalah dengan memanggil ketua dari masing-masing kelompok untuk mengetahui penyebab terjadinya penunggakan. Kami tidak bisa melakukan pengawasan kepada setiap anggota karena terlalu banyak tugas yang dibebankan”.

Dari beberapa wawancara tersebut dapat dianalisis bahwa kelompok SPP selaku penerima program belum bisa memanfaatkan dana SPP dengan baik, bahkan digunakan untuk keperluan konsumsi, sehingga tidak dapat membayar cicilan tepat waktu. Selain itu UPK dan FK dinilai tidak serius dalam menangani kelompok yang bermasalah karena tidak adanya sanksi khusus kepada kelompok SPP yang bermasalah karena pada dasarnya tidak ada jaminan pada waktu peminjaman, upaya yang dilakukan UPK dan FK hanya sebatas pengawasan kepada ketua kelompok saja karena ketua kelompok dianggap lebih paham terhadap permasalahan kelompok masing-masing, Ini dinilai tidak efektif karena pengawasan melalui ketua kelompok saja tidak akan mengatasi permasalahan yang dihadapi masing-masing anggota kelompok sehingga permasalahan yang ada akan semakin larut.

3. Kondisi sosial dan ekonomi

Selain dipengaruhi oleh faktor komunikasi dan sikap pelaksana program, penunggakan pembayaran cicilan program SPP juga dipengaruhi oleh faktor kondisi lingkungan sosial dimana program tersebut

dilaksanakan, dapat dilihat bahwa keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program SPP memang cukup besar, akan tetapi syarat keberhasilan suatu program khususnya pada program SPP ini tidak hanya terletak pada dukungan dari masyarakat atau penerima program saja, ada hal lain yang cukup mempengaruhi, yaitu Kondisi lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Kondisi sosial masyarakat dapat mempengaruhi kelancaran suatu program, apalagi pada program SPP yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Seperti keterangan dari ketua UPK yang menjelaskan bahwa “Keadaan sosial masyarakat sangat mempengaruhi pelaksanaan program SPP ini, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat yang tergabung dalam kelompok SPP berasal dari keluarga petani dan nelayan yang berpendapatan rendah sehingga mereka terfokus untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan tidak bisa mengembangkan usaha yang dilakukan, bahkan dana yang diperoleh digunakan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga”.

Permasalahan tersebut terjadi dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat yang tidak mendukung, sebagian besar masyarakat berada pada golongan tingkat ekonomi menengah kebawah dengan rata-rata bekerja sebagai petani dan nelayan, sehingga usaha yang digeluti tidak dapat berkembang. Bahkan ada motif untuk tergabung dalam kelompok SPP hanya untuk memperoleh dana pinjaman saja, selain itu hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah sehingga timbulnya *persepsi* masyarakat yang masih menganggap bahwa instansi pemerintah hanya sebagai “pemberi bantuan” belum dianggap sebagai pendorong (*enabler*), sehingga menganggap bahwa *stimulan* yang diberikan itu merupakan bantuan masyarakat, jadi tidak perlu dikembangkan lebih lanjut.

E. Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa penunggakan pembayaran cicilan program SPP di Kecamatan Serasan Timur dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

Dari sisi komunikasi dapat lihat bahwa dalam pelaksanaan program SPP tidak banyak pihak-pihak yang dilibatkan, UPK selaku pengelola kegiatan hanya berkoordinasi dengan fasilitator kecamatan dan ketua kelompok saja, Keterbatasan UPK dan FK dalam mengelola program SPP karena banyaknya kelompok yang akan ditangani dan beban kerja yang sudah berat, kurangnya pengawasan oleh pihak UPK terhadap pelaksanaan

program SPP menyebabkan rentan terjadinya penyalahgunaan dana SPP. Selain itu, dalam upaya penyelesaian permasalahan, UPK hanya berkoordinasi dengan ketua kelompok saja, hal ini dikarenakan ketua kelompok dianggap lebih memahami keadaan kelompoknya masing-masing. Seharusnya UPK harus berkoordinasi dengan berbagai pihak dan melakukan pengawasan secara langsung kepada setiap anggota SPP dalam meminimalisir penyalahgunaan dana SPP atau membentuk tim khusus untuk menangani hal tersebut.

UPK dan FK selaku lembaga pengelola dan pelaksana kegiatan dinilai kurang serius menangani kelompok SPP yang bermasalah, dapat dilihat dari tidak adanya sanksi yang diberikan kepada kelompok yang bermasalah dan upaya penanganan permasalahan yang hanya sebatas kepada ketua kelompok saja. Selain itu kelompok SPP belum memanfaatkan dana dengan baik, bahkan dana SPP digunakan untuk keperluan konsumsi hal ini dikarenakan kurangnya bimbingan kepada kelompok perempuan yang tergabung dalam program SPP. Untuk menangani permasalahan tersebut, seharusnya UPK dan FK lebih serius dalam menangani kelompok SPP yang bermasalah serta memberikan bimbingan kepada kelompok SPP agar bisa memanfaatkan dana SPP dengan baik.

Pelaksanaan program SPP mendapat dukungan dan partisipasi masyarakat cukup besar, akan tetapi keadaan perekonomian masyarakat yang tergabung dalam kelompok SPP sebagian besar berasal dari keluarga petani dan nelayan, sehingga usaha yang digeluti tidak dapat berkembang dengan baik karena mereka hanya terfokus pada usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu pihak UPK dan FK diharapkan bisa memberikan bimbingan kepada kelompok SPP untuk bisa mengembangkan usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, dalam pelaksanaannya program SPP harus mendapat dukungan dari semua pihak, baik dari pengelola maupun masyarakat sebagai target group, sehingga kesungguhan dari UPK dan peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan guna pencapaian tujuan dari program.

F. REFERENSI

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Islamy, Irfan. 1992. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Impelementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Gramedia.

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : **PIRDANI**
NIM / Periode lulus : **E01108058**
Fakultas/Jurusan : **ISIPOL / ILMU ADMINISTRASI**
E-mail address/HP : **dhony_kampoestira08@yahoo.com / 085650868798**

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP)
PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN SERASAH TIMUR
KABUPATEN NATUNA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

secara *fulltext*

content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.


untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

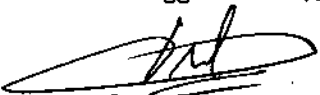
Mengetahui/disetujui

Pengelola Jurnal


Df. Eran, M.Si
NIP. 1967 0727 2005 011 001

Dibuat di : Pontianak

Pada tanggal: 10 Mei 2013


PIRDANI

nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).